

Portrait of Education Aspects in Indonesia During the Japanese Occupation (1942-1945)

Potret Sendi-Sendi Pendidikan di Indonesia Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Dadan Adi Kurniawan^{1a(*)}, Syaffrina Fadhilatul Nikmah^{2b}, Nasta Ayundra Oktavian Mahardi^{3c}

¹²³Program Studi S1 Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta

^a dadan.adikurniawan@staff.uns.ac.id

^b syaffrinafn_22@student.uns.ac.id

^c mahardinasta@student.uns.ac.id

(*) Corresponding Author

dadan.adikurniawan@staff.uns.ac.id

How to Cite: Dadan Adi Kurniawan. (2024). Potret Sendi-Sendi Pendidikan di Indonesia Masa Pendudukan Jepang (1942-1945). doi: 10.36526/js.v3i23536.

Received: 02-02-2024

Revised : 11-02-2024

Accepted: 30-05-2024

Abstract

Keywords:

Education,
Heritage of
educational practice,
Japanese occupation.

This article discusses a portrait of the development of educational institutions during the Japanese occupation in Indonesia in 1942-1945. The aspects of education include the level of education, the language of education, access to education, the cover and contents of textbooks, types of subjects, infrastructure, students and teachers, the heritage of semi-militaristic education, and the general goals of Japanese education in Indonesia. This research is important to find out the continuity regarding the heritage of Japanese education that still alive today. This research uses a historical method that includes four main stages, which are heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Data collection techniques use literature studies (library studies) in the form of books, theses, journals, and articles. The research results show that educational principles during the Japanese occupation tended to be contradictory compared to education in the Dutch colonial era. Education in Indonesia during the Japanese occupation was no longer discriminatory but inclusive (open to all people). The education of the Japanese occupation was not intellectualistic but rather semi-militaristic which prioritized physical fitness and agility. Education became a means of mobilization and a means of indoctrination in makes people who were ready to support the victory of Japan's war against the Allies in the Pacific and make Japan the leader of Greater East Asia.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek penting di dalam setiap sendi kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Setiap manusia berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik bagi pendidikannya, begitu juga dengan sebuah bangsa atau negara (Rifa'i, 2011). Kehebatan seseorang atau sebuah bangsa tak terlepas dari kemajuan di bidang pendidikannya. Di Indonesia pun juga terjadi hal yang sama, pendidikan merupakan topik krusial yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Praktik-praktik di bidang pendidikan yang berlaku di Indonesia sendiri tidak bisa dilepaskan dari sejarah pendidikan di Indonesia yang telah dimulai sejak ratusan tahun silam.

Sebagai bangsa (*nation*) dan negara (*state*), Indonesia ikut mewarisi sifat dan praktik-praktik pendidikan yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa yang pernah menjajah di Indonesia. Namun, warisan praktik pendidikan tradisional yang lebih dulu ada sebelum datangnya para penjajah Eropa, masih bisa ditemui di masa sekarang. Sebagai contoh misalnya praktik pendidikan tradisional yang dilaksanakan di langgar atau masjid-masjid, para siswa yang biasanya disebut dengan santri datang untuk mempelajari Al-Qur'an dengan guru mereka. Pendidikan yang dilakukan di langgar ini pada umumnya tidak dipungut biaya. Kalaupun dipungut biaya, orang tua memberikan sesuai dengan kerelaan hati (Rifa'i, 2011). Hingga saat ini praktik pendidikan tradisional warisan prakolonial ini masih banyak ditemukan di kampung-kampung bahkan kota-kota di Indonesia.

Begitu kolonial Belanda mulai mapan di Hindia Belanda (Indonesia) sejak dekade awal abad 19, pemerintah Hindia-Belanda tak begitu saja memberikan pendidikan bagi penduduk pribumi atau yang disebut orang Belanda sebagai *inlander*. Menjelang dan sejak politik Etis diberlakukan pada awal abad 20, pendidikan yang bagus yang telah disediakan oleh Pemerintah Hindia-Belanda hanya diperuntukan bagi orang Eropa saja. Sedangkan untuk pribumi (*inlander*) hanya disediakan pendidikan rendah (*Lagere Onderwijs*). Sekolah ini pun hanya diberikan kepada anak-anak pribumi yang status atau golongannya tinggi atau hampir setara dengan anak-anak Belanda (Rifa'i, 2011). Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda ini mulai dikenal sistem modern di mana dikenakan biaya pendidikan yang telah ditentukan nominalnya (terstruktur). Agar dapat bersekolah di ELS (*Europese Lagere School*) maka setiap anak dikenakan biaya sekitar f-6 setiap bulannya (Sugiyono et al, 2018). Hal ini kemudian juga berlaku di dalam pendidikan di Indonesia saat ini, meskipun sekolah-sekolah negeri tidak memungut biaya SPP, namun untuk sekolah swasta biasanya tetap dikenakan biaya yang harus dibayarkan setiap bulannya (terstruktur).

Setelah bertahun-tahun Indonesia berada di bawah bayang-bayang penjajah, akhirnya kemerdekaan bangsa Indonesia bisa diraih pada tahun 1945. Pasca kemerdekaan Indonesia, pendidikan terbuka bagi semua golongan dan dibuka di mana-mana. Namun pada masa ini cara mengajar konvensional dengan ceramahlah yang selalu dilakukan oleh guru-guru di sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan agar guru menjadi objek sentral dan dihormati oleh siswa-siswanya (Kartono, 1997). Hingga saat ini "budaya" mengajar dengan metode ceramah masih sangat digemari oleh guru untuk diterapkan di kelasnya. Namun di antara warisan praktik pendidikan yang sampai saat ini masih diterapkan di dalam pendidikan Indonesia, boleh dikatakan sebagiannya merupakan warisan praktik-praktik pendidikan masa pendudukan Jepang (1942-1945). Jepang berhasil masuk ke Indonesia pada tanggal 10 Januari 1942 dan mendarat di Tarakan Kalimantan Timur (sekarang masuk Provinsi Kalimantan Utara). Setelah berhasil menduduki Tarakan, Jepang mulai menyerang dan menguasai daerah-daerah lain di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang (Ricklefs, 2008). Sejak itu, penjajahan atas Indonesia resmi memulai babak baru. Indonesia mulai dijajah oleh sesama bangsa Asia sendiri.

Meskipun berkuasa dalam kurun waktu yang cukup singkat (sekitar 3,5 tahun), tetapi Jepang membawa dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Meskipun durasi menjajahnya jauh lebih singkat dibanding Belanda, tetapi pendudukan Jepang dikenal lebih kejam dibanding Belanda. Selama pendudukan Jepang, rakyat Indonesia lebih tersiksa akan kekejaman Jepang. Pemerintah Jepang dengan semboyan 3A-nya, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia terus melakukan propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau mendukung kepentingan perangnya. Akan tetapi Gerakan 3A ini tidak berhasil dilakukan oleh Jepang. Hal ini dikarenakan propaganda 3A dilakukan dengan cara yang "keras", sehingga hanya sedikit orang Indonesia yang menanggapi gerakan ini dengan serius (Ricklefs, 2008). Minimnya dukungan kepada pemerintah Jepang ini juga diperburuk dengan sikap Jepang yang mengumpulkan tenaga "cuma-cuma" yang dikenal sebagai *romusha*. Hingga kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat dan menandai berakhirnya kekuasaannya di Indonesia. Dengan terlibatnya Jepang dalam jejak rekam sejarah penjajahan Indonesia, maka penting kiranya terdapat kajian yang dapat menganalisis dan menjawab mengenai bagaimana tujuan dan politik pendidikan Jepang dalam menanamkan budaya-budayanya di Indonesia saat itu. Praktik-praktik pendidikan apa saja yang masih lestari di Indonesia hingga saat ini. Sendi-sendi (aspek-aspek) pendidikan apa saja yang mesti dipetakan untuk melihat potret pendidikan Jepang secara lebih holistic (utuh).

Secara historiografis, sudah ada beberapa tulisan yang membahas mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia masa pendudukan Jepang. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Hudaidah dan M. Arman (2021) dengan judul *Pendidikan di Indonesia Masa Pendudukan Jepang*. Penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah Jepang dalam menanamkan budayanya, kebijakan pemerintah Jepang pada sistem pendidikan di Indonesia, kebijakan pemerintah Jepang dalam kurikulum yang diterapkan, serta kebijakan pemerintah Jepang

pada pendidikan Islam di Indonesia. Namun dalam tulisan ini belum dijelaskan warisan apa yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sholeha dan Elis Setiawati (2019) yang berjudul *Pendidikan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, yang menjelaskan mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintah Jepang di bidang pendidikan yang meliputi sistem pendidikannya, model pembelajaran, murid, guru, kurikulum yang digunakan, dan kompetensi lulusan. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Suci Ramadhani (2021) yang berjudul *Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang*, yang memaparkan mengenai awal mula datanya Jepang ke Indonesia dan pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang yang meliputi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang, aktivitas yang harus dilakukan siswa ketika di sekolah, tingkatan pendidikan, pendirian sekolah guru, dan propaganda yang dilakukan Jepang dalam mencari dukungan untuk menghadapi perang.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada di atas, belum ada penelitian yang mencoba menguraikan menggunakan pendekatan pemetaan aspek atau sendi (*aspect mapping approach*) secara tegas. Penelitian-penelitian tersebut juga kurang memberikan penegasan akan “benang merah Sejarah” yang menunjukkan adanya *continuity* (keberlanjutan) yaitu warisan praktik-praktik pendidikan peninggalan Jepang yang masih ada di Indonesia sampai saat ini. Untuk itu, tulisan ini mencoba memaparkan potret sendi-sendi pendidikan di Indonesia masa pendudukan Jepang (1942-1945) meliputi aspek jenjang pendidikan, bahasa pengantar yang dipakai oleh guru dalam mengajar, akses pendidikan, sampul dan isi buku pelajaran, jenis mata pelajaran apa saja yang diajarkan, sarana prasarana yang digunakan, siswa dan guru, corak pendidikan yang semi militeristik bahkan militeristik, dan tujuan umum pendidikan Jepang di Indonesia saat itu. Sebagian besar aspek-aspek ini merupakan *legacy of educational practice* atau warisan praktik pendidikan yang masih bisa ditemukan dan bahkan bersemayam dalam dunia pendidikan di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode historis yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis dengan kritis rekaman dan peninggalan masa lampau serta menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang didapat yang disebut historiografi (Gottschalk, 1986: 32). Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menguji dan menganalisis perkembangan sendi-sendi pendidikan di Indonesia masa pendudukan Jepang (1942-1945), sekaligus memetakan dan menelusuri warisan praktik pendidikan Jepang yang masih ada sampai saat ini. Metode penelitian sejarah memiliki satu tahapan persiapan dan empat tahap pelaksanaan. Penelitian dimulai dengan memilih tema atau topik yang kemudian dilanjutkan dengan empat tahap utama yaitu *heuristik* (pencarian sumber), *kritik* (memilih dan memilah sumber yang kredibel dan valid), *interpretasi* (penafsiran atau pemaknaan), dan *historiografi* (penyajian dalam bentuk tulisan sejarah) (Kuntowijoyo, 2018: 69). Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur atau studi pustaka berupa buku-buku, jurnal, skripsi, hasil penelitian lembaga, dan artikel media massa digital yang relevan yang berkaitan dengan tema kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenjang Pendidikan

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945), banyak sekolah peninggalan milik Belanda ditutup dan dibuka kembali setelah mengalami perbaikan dan perubahan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang berada dibawah naungan (kekuasaan dan pengawasan) lembaga militer Jepang. Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tersebut bernama *Byunko Kyoku* (Poesponegoro & Notosusanto, 2008: 95). Karena hal inilah tidak heran jika pendidikan pada masa itu bernuansa semi militeristik bahkan militeristik. Sistem penggolongan dari status bangsa dan sosial yang sangat kental pada masa pendudukan Belanda dihapuskan. Berikut jenis-jenis sekolah formal pada masa pendudukan Jepang di Indonesia yang diperuntukkan untuk rakyat pribumi:

1. Pendidikan Dasar (*Kokumin Gakko* atau Sekolah Rakyat)
Sekolah ini terbuka untuk umum dengan lama masa studinya adalah enam tahun. Sekolah ini menjadi penerus sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda seperti sekolah pedesaan, sekolah kelas satu, sekolah menengah, *Hollandsch Inlandsche School* (HIS), *Europeesche Lagere School* (ELS). Sekolah Rakyat (SR) pertama berdiri dan dibuka pada 1 Juni 1942 dengan nama *HIS Djagamonjet*, *Baloelweg Jatinegara*, dan *HIS Gastenweg* (Ambiya & Jayusman, 2022: 5).
2. Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*)
Sekolah ini merupakan pendidikan lanjutan dari Sekolah Rakyat. Sekolah Menengah Pertama ini memiliki masa studi selama tiga tahun.
3. Sekolah Menengah Tinggi (*Koto Chu Gakko*)
Sekolah Menengah Tinggi pada mulanya hanya memiliki empat sekolah yang tersebar di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Selanjutnya pada tahun 1943, terdapat dua sekolah baru yang terletak di Bandung dan Surakarta (Ambiya & Jayusman, 2022: 5). Sekolah ini memiliki fungsi sebagai tempat siswa untuk mempersiapkan diri menuju sekolah tinggi (universitas atau perguruan tinggi). Mereka yang menempuh pendidikan di sekolah ini adalah yang berhasil melewati ujian kelulusan di tingkat pendidikan sebelumnya (Sekolah Menengah Pertama).
4. Sekolah Menengah Kejuruan
Sekolah ini mencakup sekolah lanjutan yang memiliki ciri khas yakni vokasional. Sekolah ini terdapat dua cabang, yakni Sekolah Pertukanga dan Sekola Menengah Teknik. Contoh bidang yang diajarkan di tingkat kejuruan seperti bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian (Nuryanto, 2020: 44). Pada masa pendudukan Jepang, di Cirebon didirikan Sekolah Pelayaran dan Sekolah Pelayaran Tinggi (Ambiya & Jayusman, 2022: 5).
5. Sekolah Guru (*Sihan Gakko*)
Terdapat tiga jenis sekolah untuk calon guru pendidik pada masa pendudukan Jepang, yakni sekolah guru (*Syoto Sihan Gakko*) dengan lama studi dua tahun, Sekolah Guru Menengah (*Cutoo Sihan Gakko*) dengan masa pendidikan selama 4 tahun, dan Sekolah Guru Tinggi (*Koto Sihan Gakko*) dengan masa pendidikannya selama enam tahun (Poesponegoro & Notosusanto, 2008: 83).
6. Perguruan Tinggi
Pada masa pendudukan Jepang, banyak Perguruan Tinggi ditutup oleh Jepang. Namun, masih ada beberapa Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi yang diperbolehkan beroperasi seperti Sekolah Tinggi Kedokteran (*Ika Dai Gakko*) di Jakarta serta Sekolah Teknik (*Kogyo Dai Gakko*) di Bandung. Selanjutnya, Jepang juga membuka Sekolah Tinggi Pamongpraja (*Kenkoku Gakuin*) di Jakarta dan Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor (Mestoko, 1985: 139).

Secara umum, jenjang pendidikan formal di masa pendudukan Jepang “lebih ringkas dan sederhana” dibandingkan dengan model pendidikan kolonial Belanda. Lama tempuh pendidikan pada masa pendudukan Jepang pun juga lebih ringkas dari pada model pendidikan kolonial Belanda. Jenjang pendidikan peninggalan Jepang inilah yang kemudian diadopsi di masa Orde Lama dan bahkan hingga pada masa sekarang ini.

Bahasa Pengantar Pendidikan

Pada masa awal pendudukan (1942), Jepang menerapkan politik bahasa yang menjadi kebijakan *Languange Planning* di Indonesia (Permadi, 2015: 593). Jepang melarang penggunaan

bahasa Belanda dan memperluas penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang di Indonesia. Alasannya adalah Jepang ingin dengan mudah dapat memahami informasi-informasi dalam bahasa Indonesia. Sedangkan pelarangan penggunaan bahasa Belanda sendiri menjadi usaha Jepang untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh Belanda di Indonesia. Pelarangan ini tidak terbatas hanya dalam bahasa tutur, namun juga mencakup pada bahasa tulis. Pelarangan ini diumumkan oleh Jepang melalui majalah maupun surat kabar. Jepang ingin dengan adanya kebijakan ini maka mereka dapat menghilangkan pengaruh bahasa asing dan menumbuhkan bahasa nasional di Indonesia yang kemudian dapat memanfaatkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia yang tumbuh melalui kesadaran terhadap bahasa nasional.

Terkait perkembangan bahasa Indonesia, jauh sebelum datangnya Jepang di Indonesia, sudah ada sosok yang menggelorakan penggunaan bahasa Indonesia. Sosok itu bernama Mohammad Tabrani. Pada awalnya, Tabrani menyebut bahasa Indonesia dalam tulisannya berjudul "Kasih" yang terbit pada koran *Hindia Baroe* pada 10 Januari 1926 (Adnan, 2023). Satu bulan kemudian, Tabrani kembali menerbitkan tulisannya dalam rubrik "Kepentingan" koran *Hindia Baroe* berjudul "Bahasa Indonesia" yang terbit 11 Februari 1926. Dalam tulisannya itu, Tabrani mengkritik kaum-kaum terpelajar bangsa Indonesia yang melihat penggunaan bahasa Belanda sebagai suatu ukuran kemajuan. Tabrani memberikan peringatan jika bahasa merupakan salah satu 'jembatan' dalam penguatan persatuan sehingga perumusan bahasa Indonesia saat itu sangat diperlukan.

Selain penggunaan bahasa Indonesia, Jepang juga memperbolehkan penggunaan bahasa lokal seperti Jawa, Madura, dan Sunda (Permadi, 2015: 594). Penggunaan bahasa lokal ini untuk menjembatani komunikasi di tingkat pedesaan yang belum begitu familiar dengan bahasa Indonesia apalagi bahasa Jepang. Kesadaran mengenai pentingnya bahasa Indonesia juga merangsang rakyat Indonesia untuk semakin bersemangat dalam mempelajarinya. Terutama dalam bidang pendidikan, karena syarat agar mereka mendapatkan pendidikan yang tinggi adalah menggunakan bahasa Indonesia. Untuk mencari pekerjaan yang baik juga sama, syaratnya adalah dapat menguasai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pendudukan Jepang saat itu turut andil dalam mempromosikan, mengakselerasikan dan memasyarakatkan "bahasa Indonesia" ke berbagai daerah di Indonesia.

Akses Pendidikan

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pendidikan bersifat "diskriminatif dan rasialis" yaitu dilandaskan pada status sosial, golongan, bangsa dan warna kulit. Penggolongan ini dibagi menurut sistem pembagian masyarakat kolonial seperti golongan putih untuk orang Eropa, golongan oriental atau timur untuk orang Cina dan Arab, serta untuk golongan pribumi itu sendiri. Hal ini juga semakin ditegaskan dalam penggunaan bahasa pengantar yang digunakan, yakni penggunaan basa Belanda untuk sekolah kaum elit Eropa dan bahasa Melayu untuk golongan pribumi (Prayudi & Salindri, 2015: 21).

Adapun pada masa pendudukan Jepang, pendidikan tidak lagi 'eksklusif' melainkan bersifat 'inklusif' di mana diskriminasi bangsa dan ras dalam pendidikan dihilangkan (Ambiya & Jayusman, 2022: 6). Sekolah-sekolah banyak yang diintegrasikan dan menjadi sekolah negeri (sebagian tetap berstatus swasta). Hasil penyatuan tersebut membentuk Sekolah Rakyat (SR). Tujuan diintegrasikannya sekolah-sekolah ini adalah tidak adanya perbedaan golongan dalam masyarakat karena pada hakikatnya manusia itu sama derajatnya (Makmur et al., 1993: 101). Dari penegrian sekolah oleh Jepang ini pada mulanya Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia. Oleh rakyat Indonesia, kebijakan ini seperti berkah tersendiri karena mereka mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan serta memperoleh ilmu pengetahuan baru.

Jepang tidak lagi menerapkan pendidikan yang diferensiatif (*gradualis*) seperti yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jepang menerapkan kebijakan penyeragaman pendidikan di seluruh Indonesia, di mana tidak lagi memandang gelar, bangsa, ras, maupun golongan. Pendidikan yang diterima oleh rakyat Indonesia juga disamakan, tidak membeda-bedakan kurikulum. Kuantitas dan kualitas pendidikan pada masa Jepang disamakan. Semua serba

disederhanakan dan diratakan (lebih adil). Pendidikan dilaksanakan dengan “sistem tunggal”. Pendidikan lebih bersifat sosialis yakni terbuka dan sama rata bagi semua orang. Pendidikan didesain hampir sama baiknya antara sekolah yang satu dengan yang lainnya, meskipun riilnya agak susah direalisasikan, terutama antara sekolah-sekolah di perkotaan dan di pedesaan. Siapapun boleh mengenyam pendidikan selama mengikuti prosedur dan arahan sesuai desain pendidikan pendudukan Jepang yang bercorak semi militeristik dan bahkan militeristik. Pemerintah pendudukan Jepang menekankan *physical training* bukan mental disiplin. Hal ini yang ditekankan oleh pemerintah Jepang untuk mencapai target Jepang secara khusus untuk memenangi pertempuran mereka melawan Sekutu. Jika dilihat dari jumlah pasukan yang dimiliki Jepang, Jepang tercatat hanya memiliki sedikit pasukan yang siap bertempur (Sugiyono, 2018: 46-47).

Sampul dan Isi Buku Pelajaran

Pembuatan buku-buku baru oleh Jepang tak lain dan tak bukan adalah untuk mendukung kebijakan pendidikan Jepang, yakni untuk mewujudkan “Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. Isi buku pelajaran pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan buku-buku pelajaran era kolonialisme Belanda. Sebagian besar buku-buku yang digunakan Jepang saat itu merupakan buku-buku tinggalan (produksi) kolonial Belanda. Pendudukan yang singkat dan kondisi sering berperang menyebabkan Jepang kesulitan untuk memproduksi sendiri buku-buku pelajaran secara utuh. Implikasinya, ada sebagian buku tinggalan Belanda yang dirubah baik istilah maupun pemikiran terutama yang menyangkut ideologi dan identitas sebuah bangsa (Kawamura, 2004:159).

Secara lebih rinci terdapat susulan Lampiran yang merupakan wujud ‘revisi’ atau ‘penyesuaian’ buku-buku pelajaran tinggalan Belanda yang disesuaikan dengan kebijakan Jepang saat itu. Sebagai contoh penyebutan istilah *Hindia Belanda* diubah menjadi *Indonesia*, penyebutan *Djapoen* diubah menjadi *Nippon*, penyebutan *Belanda* diubah menjadi *Negara Barat*, dan penggunaan tahun *Masehi* diubah menjadi tahun *Koki* atau *Shimu*. Penanggalan *Koki* ini merupakan penanggalan yang dimulai pada tahun 660 S.M yang dimulai ketika kaisar pertama Jepang naik tahta. Buku-buku yang telah disensor ini kemudian terus dipakah di sekolah-sekolah rakyat di masa-masa awal pendudukan Jepang (Kawamura, 2004:159).

Sebagai informasi saja bahwa *Djapoen* merupakan sebutan yang beredar luas di kalangan bangsa Barat yang pertama kali dicetuskan seorang petualang terkenal bernama Marcopolo saat berkelana ke China (Asia) abad 13. Adapun *Nihon/Nippon* merupakan sebutan yang diberikan oleh orang-orang China. Selain itu, nama *Nihon/Nippon* ini dikarenakan Pangeran Shotoku Taishi memberi julukan pada dirinya dengan “Kaisar Negeri Matahari Terbit” dan memberitahukannya pada Kaisar Dinasti Sui Tiongkok. Pemberian nama ini merujuk pada letak geografis Jepang yang berada di timurnya China. *Nihon/Nippon* berasal dari kata *Nichi/ni* yang berarti matahari dan *Hon* yang berarti dasar atau asal, sedangkan *Ni* dan *Phon* yang artinya tempatnya matahari terbit, sebab Jepang berada di sebelah timurnya China sehingga jika dilihat dari wilayah China, Jepang dianggap wilayah terbitnya matahari (Narasi Sejarah.id, 2022).

Keterbatasan Jepang dalam mengadakan buku-buku Pelajaran menjadikan Jepang mengambil keputusan menyalin buku-buku yang digunakan oleh Pemerintah Belanda sebelumnya. Pada tahun 1943, pemerintah Jepang juga menerbitkan Katalog Buku Pelajaran yang berisikan 34 judul yang tertuang dalam 37 buah buku. Buku-buku ini berjumlah lebih baya daripada judulnya karena beberapa buku terdapat edisi keduanya (Kawamura, 2004: 160). Dalam konteks sampul buku, tidak semua buku pelajaran isinya dirubah. Ada sebagian buku pelajaran yang hanya dirubah bagian judul dan tampilan sampulnya saja. Sebagai contoh, buku berjudul “*Ngelmoe Boemi: Negari Walandi lan Boewana Gangsa*” jilid I dan II dirubah menjadi “*Asia Raja dan Benoea jang Lain-lain*”. Contoh lain yaitu buku berjudul “*Peladjaran Badan Manoesia I oentoek Sekolah Ra’jat*” dan “*Peladjaran Badan Manoesia II oentoek Sekolah Ra’jat Kelas V dan VI*” hanya diganti nama penerbit dan desain gambar sampul depan. Biasanya buku-buku era pendudukan Jepang diganti dengan sampul yang bernuansa budaya Jepang seperti gambar pohon sakura, gunung fuji, bendera jepang dan prajurit jepang. Di bidang pembelajaran latihan rohani, pemerintah Jepang juga menerbitkan

buku-buku yang berisikan pembinaan sikap kesopanan dan santun, penjelasan mengenai menumbuhkan sikap dalam berbuat baik dan penjelasan mengenai hal yang baik dan hal yang buruk. Pembelajaran ini tertuang dalam 5 jilid buku dengan judul “*Didikan Boedi Pekerti*” dan “*Tjeritera Goeroe*” (Kawamura, 2004: 162-166).

Dalam konteks pengantar buku, juga terjadi perubahan. Pada masa kolonial Belanda, isi buku dimulai dengan penjelasan bab terkait cakrawala kebudayaan Belanda dan bangsa Eropa/Barat lainnya yang bahkan bisa menghabiskan satu jilid. Namun di masa pendudukan Jepang, pengantar buku berisi penjelasan tentang cakrawala kebudayaan bangsa Jepang dan negara-negara timur yang terletak di wilayah “Asia Timur Raya”. Bahkan sebutan atau istilah *Belanda* atau *Nederland* sama sekali tidak ada, melainkan hanya sebutan yang lebih umum yakni negara Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun foto atau gambar-gambar yang terdapat di dalam buku merupakan gambar yang berasal dari pemerintah Belanda, namun penjelasannya merupakan doktrin-doktrin budaya Jepang (Kawamura, 2004: 164).

Jenis Mata Pelajaran

Mata pelajaran sekolah pada masa pendudukan Jepang tidak berbeda dengan masa kolonial Belanda. Masih ada pelajaran ilmu hitung, ilmu bumi/alam, sejarah, geografi, bahasa, kerajinan tangan, perawatan rumah, dan seni budaya (Rifa'i, 2011: 84). Pelajaran bahasa terdiri dari bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah (Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lain). Penggunaan bahasa Belanda atau Inggris pada masa pendudukan Jepang juga dilarang. Bahasa Indonesia disini menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar di sekolah (Hudaidah & Karwana, 2021: 100). Namun kompensasinya dari itu adalah bahasa Jepang menjadi sebuah pelajaran yang diajarkan di sekolah beserta adat istiadatnya. Dalam mata pelajaran tentang seni meliputi seni musik, seni lukis, maupun menulis (*shuji*).

Untung menunjang itu semua, pemerintah Jepang menawarkan bantuan uang kepada sekolah-sekolah agar mereka dapat menggunakannya sehingga pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan target yang ditentukan. Misalnya digunakan untuk membeli buku-buku yang menunjang seperti mata pelajaran yang disebutkan di atas (Hudaidah & Karwana, 2021: 101). Selanjutnya di sekolah-sekolah negeri juga diajarkan pelajaran mengenai budi pekerti yang identik dengan keagamaan. Jepang juga memberikan peran Islam yang cukup besar dalam bidang pendidikan, karena Jepang melihat peran Islam di Indonesia cukup masif terutama dari kalangan para ulama. Di depan para ulama, para pejabat tinggi militer Jepang mengatakan akan melindungi dan menghormati Islam (Benda, 1980: 153). Selain itu, Jepang juga memberikan pelajaran-pelajaran semi militeristik yang sebelumnya belum pernah diajarkan dan wajib dilakukan setiap pagi seperti *saikerei*, *taiso*, *kyoren*, *kinrohosi*, *dai toa*, *tenno heika*, *kimigayo* dan *hinomaru* (Rifa'i, 2011: 87).

Sarana Prasarana, Siswa dan Guru

Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 berdampak pada banyaknya sarana prasarana publik yang rusak termasuk sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan karena perang yang tidak terhindarkan antara Jepang dan Belanda selaku kolonialis bertahan. Selain itu, sarana prasarana publik yang rusak juga disebabkan karena “politik bumi hangus” yang dilakukan Belanda dalam membendung arus kedatangan pasukan Jepang. Implikasinya, banyak fasilitas umum yang rusak seperti sekolah, pelabuhan, jembatan, stasiun, dan bangunan-bangunan strategis lainnya (Perdana, 2010).

Rusaknya sarana dan prasarana umum secara tidak langsung turut mempengaruhi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia khususnya di era pendudukan Jepang (1942-1945). Pemerintah pendudukan Jepang memutuskan untuk menggunakan gedung-gedung sekolah tinggalan Belanda yang masih tersisa dan sebagiannya lagi membangun sekolah-sekolah baru. Di sisi yang lain, jumlah siswa juga mengalami penurunan di era pendudukan Jepang. Jumlah siswa Sekolah Dasar merosot hingga 30% dan sekolah menengah merosot hingga 90%, sekolah dasar yang pada masa pendudukan Belanda berjumlah 21.500 menjadi 13.500, sedangkan sekolah

menengah yang awalnya berjumlah 850 hanya tinggal 20 saja. Hal ini disebabkan karena merosotnya jumlah guru atau pendidik. Era Jepang memang mengalami krisis guru (Ambiya & Jasyusman, 2022).

Jumlah guru mulai berkurang dikarenakan adanya unsur paksaan untuk menerjemahkan bahasa Jepang dan menggunakannya sebagai bahasa pengantar di sekolah. Banyak guru yang tidak mampu dan memilih mundur karena sulitnya mempelajari bahasa Jepang. Selain itu, banyak guru-guru yang tidak mampu mengajarkan materi pelajaran yang begitu berat. Mengetahui permasalahan tersebut, pemerintah Jepang mengupayakan untuk kondisi tersebut dengan cara menaikkan gaji guru sesuai tingkatan sekolah dan merekrut guru-guru baru melalui ujian-ujian yang telah ditentukan. Namun demikian, realitanya tidak semulus yang diharapkan. Secara kualitas dan kuantitas, guru di era pendudukan Jepang mengalami penurunan (Rohman, 2018).

Warisan Pendidikan Semi Militeristik

Tidak sedikit warisan praktik pendidikan era pendudukan Jepang masih lestari sampai saat ini. Sadar tidak sadar, banyak masyarakat Indonesia (para pelajar, guru, mahasiswa, dosen, pejabat bahkan karyawan di perusahaan-perusahaan swasta) yang masih mempraktikkan budaya-budaya atau tradisi peninggalan Jepang. Berikut adalah beberapa tradisi atau budaya yang menjadi rutinitas di era pendudukan Jepang di Indonesia sebagai wujud program pendidikan pada Sekolah Rakyat yang bercorak militeristik:

1. *Taisho* yaitu kegiatan senam setiap pagi yang wajib dilakukan di sekolah dengan maksud memelihara kebugaran tubuh (Rifa'i, 2011).
2. *Kyoren* yaitu kegiatan wajib bagi tiap siswa untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran, seperti baris berbaris yang sama seperti tentara Jepang yang dilakukan oleh siswa dan guru setiap pagi (Supriadi, 2003).
3. *Chorei* yaitu kegiatan apel pagi yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran.
4. *Kinrohoshi* yaitu kegiatan semacam kerja bakti seperti pembersihan sekolah, pembersihan asrama, jalan raya, menanam pohon jarak (guna senjata perang) dan mengumpulkan bahan kebutuhan militer (Rifa'i, 2011).
5. *Kimigayo* yaitu kegiatan wajib menyanyikan lagu kebangsaan Jepang sebelum masuk sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan nasionalisme di jiwa para siswa-siswi Indonesia (Rifa'i, 2011).
6. *Tenno Heika* yaitu kegiatan mengibarkan bendera Jepang dan memberi penghormatan pada kaisar Jepang Tenno Heika (Sholeha & Setiawati, 2019).
7. *Dai Toa* adalah kegiatan setiap pagi dengan mengucapkan sumpah setia atas cita-cita Indonesia dalam berperan di Asia Timur Raya (Sugiyono, dkk, tanpa tahun).
8. *Seinterai* dan *Gakutotai* yaitu dua nama kegiatan yang sama-sama wujud latihan jasmani berbentuk barisan di setiap sekolah. *Seinterai* itu semacam barisan murid Sekolah Rakyat, sedangkan *Gakutotai* lebih pada barisan yang diperuntukan bagi murid-murid sekolah lanjutan (Supriadi, 2003).
9. *Seikirei* yaitu kegiatan hormat ke arah timur sebagai bentuk tanda penghormatan ke dewa matahari dan terhadap kaisar Jepang. Penghormatan ini dilakukan dengan membungkukkan badan hingga 90 derajat ke arah timur (Rifa'i, 2011).
10. *Hinomaru* yaitu kegiatan di mana siswa diwajibkan untuk menghormat bendera Jepang (Rifa'i, 2011).
11. *Kepala gundul* yaitu kebiasaan menanamkan semangat kemiliteran dan keberanian dengan cara mencukur rambut sampai gundul (atau tipis) bagi siswa laki-laki. Menggunduli rambut ini

berlaku untuk semua jenjang pendidikan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Jepang (Anggoro, 2020).

Tujuan Umum Pendidikan Jepang

Penyelenggaraan pendidikan Jepang saat menduduki Indonesia (1942-1945) secara umum bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Jepang menjadi “pemimpin Asia Timur Raya”, yang meliputi Dataran China, Manchuria, Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Indocina dan Asia (Rusia). Pendidikan merupakan salah satu alat menuju tujuan tersebut. Lewat pendidikan, Jepang berusaha mempengaruhi dan membentuk pola pikir atau ‘mentalitas’ bangsa Indonesia yang anti Barat dan sebaliknya menempatkan Jepang sebagai pemimpin, penolong dan pembebas Asia dari cengkraman kolonialisme bangsa-bangsa Barat (Amerika dan Eropa). Dengan kata lain, pendidikan di era pendudukan Jepang berguna dalam ‘menipponkan’ bangsa Indonesia (Sugiyono et al, 2018).

Secara teoritis, mentalitas sangat berpengaruh pada pola pikir dan cara bertindak. Ketika mentalitas atau alam pikir masyarakat Indonesia sudah terpengaruhi Jepang (melalui doktrin-doktrin pendidikan di sekolah dan di masyarakat) maka masyarakat Indonesia akan mudah dikontrol dan diarahkan sesuai kehendak Jepang. Tujuan Jepang menduduki Indonesia adalah ingin memobilisasi massa sebanyak-banyaknya guna menopang kekuatan militer Jepang dalam rangka memudahkan dan mewujudkan impian ‘menghegemoni’ Asia Timur Raya. Jepang membutuhkan banyak sekali pasukan dalam perangnya melawan Sekutu baik di Pasifik maupun di tempat lain. Dari tujuan inilah, pendidikan menjadi salah satu jalan mewujudkannya (Sugiyono et al, 2018).

Di sisi lain, dalam rangka memobilisasi masyarakat Indonesia sebanyak-banyaknya, Jepang juga menerapkan politik ‘merangkul’ Islam. Politik ini dipilih karena mayoritas penduduk Indonesia saat itu beragama Islam. Pendidikan Islam yang mulanya mendapatkan perlawanan di masa kolonialisme Belanda, kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah Jepang. Hal ini terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan Jepang terhadap pendidikan Islam. Jepang memberikan bantuan dan melakukan kunjungan ke beberapa pondok pesantren, mengizinkan barisan Hizbullah untuk beroperasi, pembentukan PETA (Pembela Tanah Air) yang kemudian menjadi cikal-bakal TNI (Tentara Nasional Indonesia) oleh para ulama dan pemimpin nasional, serta mengizinkan partai Masyumi untuk berdiri kembali (Benda, 1980). Selain itu, pada akhir tahun 1942 pemerintah Jepang membentuk *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) yang memiliki fungsi sebagai penasehat umum dalam perkara agama, seperti mengangkat pegawai agama dan mengawasi buku-buku agama (Djaelani, 2016).

MIAI atau *Majelis Islam A'laa Indonesia* merupakan organisasi yang beralaskan agama Islam yang berdiri pada 21 September 1937 di Surabaya. Berdirinya MIAI ini adalah untuk mempererat hubungan antar umat Islam di Indonesia dengan umat Islam di luar negeri dan menyatukan suara demi membela Islam. Yang memprakarsai berdirinya MIAI adalah K.H Mas Mansur, K. H Muhammad Dahlan, K. H Wahab Hasbullah, dan W. Wondoamiseno (Mulyani, 2006). Tugas MIAI semasa penjajahan Jepang adalah memberi tempat yang layak bagi Islam dalam masyarakat, menjadikan Islam mampu mengikuti perkembangan zaman, dan menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Selain itu MIAI juga bertugas membantu Jepang untuk dapat mensukseskan program Jepang dalam menciptakan Asia Raya, namun pada akhirnya Jepang membubarkan MIAI pada Oktober 1943 (Hanafi, 1993).

Adapun MASYUMI atau *Majelis Syuro Muslimin* berdiri pada 7 November 1945 yang didasarkan pada putusan Kongres Muslimin Indonesia di Yogyakarta. Salah satu yang mendukung berdirinya Masyumi adalah Muhammadiyah (Syaifullah, 2003). Tokoh yang menginisiasi pembentukan Masyumi antara lain Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, Prof. Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Roem, Muhammad Nasir, Prawoto Mangkusasmito, Ki Bagus Hadikusumo, Dr. Soekiman Wirosandjojo, Mohammad Mawardi, dan Dr. Abu Hanifah. Masyumi ini dapat dikatakan sebagai organisasi yang mencakup seluruh umat Islam di Indonesia yang dapat dilihat dari para wakil-wakil partai pilik dan gerakan keagamaan yang ikut menduduki jabatan di dalam Masyumi (Samsuri, 2004). Namun pada tahun 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden

(Penpres) yang menyatakan presiden memiliki hak untuk mendindak partai-partai politik yang tidak memiliki dasar yang sama dengan dasar negara. Karena Masyumi dianggap bertentangan atau tidak sejalan dengan pemerintah, maka setelah turunnya Penpres yang kemudian disusul dengan turunnya Kepres (Keputusan Presiden), akhirnya pada tahun 1960 Masyumi resmi dibubarkan (Ishak, 2008).

PENUTUP

Secara umum, pendidikan masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) cenderung kontradiktif dibandingkan dengan prinsip pendidikan kolonial Belanda. Pendidikan di Indonesia masa pendudukan Jepang tidak lagi diskriminatif melainkan bersifat inklusif (terbuka untuk semua golongan). Jenjang pendidikan dan jenis-jenis sekolah disederhanakan. Budaya-budaya warisan kolonial Belanda atau bangsa Eropa/Barat dilarang digunakan. Pendidikan di era pendudukan Jepang tidak lagi seintelektualistis era colonial Belanda melainkan lebih bersifat semi militeristik bahkan militeristik. Berbagai tradisi atau aktivitas di dunia pendidikan yang bersifat semi militeristik antara lain seperti *saikerei*, *taiso*, *kyoren*, *kinrohoshi*, *dai toa*, *tenno heika*, *kimigayo* dan *hinomaru*. Berbagai kebijakan pendidikan di era pendudukan Jepang diarahkan pada pendidikan jasmani yang mengutamakan kebugaran tubuh dan ketangkasan badan. Masyarakat Indonesia (utamanya Masyarakat Islam) dirangkul agar terbentuk jiwa nasionalisme Jepang. Pendidikan menjadi salah satu sarana indoktrinasi dalam mencetak manusia-manusia yang siap dimobilisasi dalam rangka memenangkan perang Jepang melawan Sekutu di Pasifik dan menjadikan Jepang sebagai pemimpin Asia Timur Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. I. (2023). *Profil Tabrani, Pelopor Kongres Pemuda 1 1926 Akar Sumpah Pemuda*. <https://tirto.id/profil-tabrani-pelopor-kongres-pemuda-i-1926-akar-sumpah-pemuda-qxLD> diakses pada 30 Januari 2024.
- Ambiya, S. A & Jayusman, I. (2022). Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945). *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, 6(1), 1-12.
- Anggoro, H. T. (7 Desember 2020). *Gerakan Anti-Gundul Pelajar Masa Jepang*. *Historia.id*. Diakses Pada 2 Februari 2024 dari <https://historia.id/kultur/articles/gerakan-anti-gundul-pelajar-masa-jepang-PzWEe/page/1>
- Benda, H. J. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Djaelani, A. Q. (2016). *Sejarah Gerakan Politik Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Bee Media.
- Gottschalk, Louis. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hanafi, Hasan. (1993). *Ensiklopedia Islam 3*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve
- Hudaidah. & Karwana, M, A, P. (2021). Pendidikan di Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *Danadyaksa Historica*, 1(2), 97-104.
- Ishak, Noor. (2008). *Pergerakan Partai Masyumi di Indonesia 1945-1960*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kartono, K. (1997). *Tujuan Pendidikan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kawamura, Chiyo. (2004). Pendidikan Sekolah Rakyat di Jawa pada Masa Pendudukan Jepang dari Perspektif Buku Pelajaran. *Lembaran Sejarah*, 7(1), 155-172
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Makmur, D., Pius, S. H., Sukri, M., & Hadi, S. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Mestoko, S. (1985). *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mulyani, Tatik. (2006). *Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI) dalam Pergerakan Nasional Tahun 1937-1942*. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret.

- Narasi Sejarah.id. (7 Desember 2022). *Asal-Usul Penamaan Jepang dalam Catatan Sejarah*. Diakses Pada 2 Februari 2024 dari <https://narasisejarah.id/asal-usul-penamaan-jepang-dalam-catatan-sejarah/>
- Perdana, N. A. (2010). Pengaruh Pendudukan Jepang Terhadap Masyarakat Magelang 1942-1945. *Paramita*, 20 (2), 143-157
- Permadi, E. G. (2015). Politik Bahasa Pada Masa Pendudukan Jepang. *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(3), 590-603.
- Poesponegoro, M. & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prayudi, G. & Salindri, D. (2015). Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901-1942. *Publika Budaya*, 3(1), 20-34.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semester.
- Rifa'i, M. (2011). *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Masa Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rohman, Miftahur. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 15-33
- Samsuri. (2004). *Politik Islam Anti Komunis*. Yogyakarta: PT. Safira Insani Press.
- Sholeha dan Setiawati, E. (2019). Pendidikan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945. *Jurnal Swarnadwipa*, 5(3), 130-141
- Sugiyono, et al. (2018). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Supriadi, Dedi. (2003). *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Depdikbud.
- Syaifullah. (2003). Perjalanan Politik Muhammadiyah dari Ahmad Dahlan Hingga Syafi'i Ma'rif. *TANWIR: Jurnal Pemikiran Agama dan Peradaban*, 1(1).